



LAPORAN KEUANGAN

TAHUNAN

(AUDITED)

**20
23**

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN
LOKA RISET PERIKANAN TUNA

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Satuan Kerja Loka Riset Perikanan Tuna adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Loka Riset Perikanan Tuna mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Satuan Kerja Loka Riset Perikanan Tuna. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Denpasar, Mei 2024

Kepala Loka Riset Perikanan Tuna,



Ni Nyoman Siti Mardiani Satria, S. Akt
NIP. 19820903 200701 2 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Pernyataan Tanggung Jawab	1
Ringkasan	2
I. Laporan Realisasi Anggaran	4
II. Neraca	5
III. Laporan Operasional	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	7
V. Catatan atas Laporan Keuangan	8
A. Penjelasan Umum	8
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	21
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	28
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	33
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	39
F. Pengungkapan Kejadian Penting Lainnya	41
VI. Lampiran dan Daftar	42

SATUAN KERJA LOKA RISET PERIKANAN TUNA
JALAN MERTASARI NO. 140, BR. SUWUNG KANGIN, SIDA KARYA,
DENPASAR SELATAN, BALI 80224
TELEPON 0361 726201, FAXIMILE 0361 8497447

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Loka Riset Perikanan Tuna tingkat satker selaku UAKPA yang terdiri dari : (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Denpasar, Mei 2024

Kepala Loka Riset Perikanan Tuna,



Ni Nyoman Siti Mardiani Satria, S. Akt
NIP. 19820903 200701 2 002

Laporan Keuangan Satuan Kerja Loka Riset Perikanan Tuna periode 31 Desember 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada periode 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.95.977.864 dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara pada periode 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp4.722.206.924 atau mencapai 99 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp4.764.171.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023. Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp22.476.879.470 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 25.082.953; Aset Tetap (neto) sebesar Rp 22.443.731.641 dan aset lainnya Rp8.064.876 dengan kewajiban senilai Rp 9.396.272 serta nilai ekuitas sebesar Rp 22.467.483.198.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.000.000, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp5.301.566.238, sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp5.301.566.238. Surplus dari Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp 16.964.029 dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp5.283.602.209.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal adalah sebesar Rp22.615.448.897 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp5.283.602.209 ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp492.232.450. dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp4.643.404.060 sehingga Ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp22.467.483.198.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas Laporan Keuangan Tahunan TA 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**KANTOR LOKA RISET PERIKANAN TUNA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022***(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	TA 2023		% thd	TA 2022
		ANGGARAN	REALISASI	Angg	REALISASI
Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
Pendapatan PNB		0	95.977.864	0.00	9.559.999
Jumlah Pendapatan		0	95.977.864	0.00	9.559.999
Belanja Negara	B.2				
Belanja Pegawai	B.3	1.309.486.000	1.301.604.492	100	2.350.040.159
Belanja Barang	B.4	3.119.685.000	3.086.337.432	99	2.090.328.172
Belanja Modal	B.5	335.000.000	334.265.000	0.00	-
Jumlah Belanja Negara		4.764.171.000	4.722.206.924	99	4.440.368.331

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

**KANTOR LOKA RISET PERIKANAN TUNA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	0	0
Penyisihan piutang tidak tertagih - piutang bukan pajak (netto)	C.3	0	2.049.526
Persediaan	C.3	25.082.953	94.241.199
Jumlah Aset Lancar		25.082.953	96.290.725
ASET TETAP			
Tanah	C.7	13.175.070.000	13.175.070.000
Peralatan dan Mesin	C.8	10.451.574.960	10.321.550.291
Gedung dan Bangunan	C.9	9.803.394.601	9.205.549.601
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.10	264.996.920	264.996.920
Aset Tetap Lainnya	C.11	0	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.12	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.13	(11.251.304.840)	(10.439.293.466)
Jumlah Aset Tetap		22.443.731.641	22.527.873.346
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.14	0	0
Aset Lain-Lain	C.15	422.092.772	0
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.16	(414.027.896)	0
Jumlah Aset Lainnya		8.064.876	0
JUMLAH ASET		22.476.879.470	22.624.164.071
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.18	9.396.272	8.715.174
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		9.396.272	8.715.174
JUMLAH KEWAJIBAN		9.396.272	8.715.174
EKUITAS			
Ekuitas	C.21	22.467.483.198	22.615.448.897
JUMLAH EKUITAS		22.467.483.198	22.615.448.897
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		22.476.879.470	22.624.164.071

III. LAPORAN OPERASIONAL

**KANTOR LOKA RISET PERIKANAN TUNA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
KEGIATAN OPERASIONAL			0
PENDAPATAN	D.1		
Penerimaan Negara Bukan Pajak		1.000.000	0
JUMLAH PENDAPATAN		1.000.000	0
BEBAN	D.2		
Beban Pegawai		1.303.654.127	2.343.395.374
Beban Persediaan		16.185.299	15.160.969
Beban Barang dan Jasa		1.580.784.622	1.523.703.056
Beban Pemeliharaan		1.231.969.635	415.707.567
Beban Perjalanan Dinas		249.223.385	131.168.896
Beban Penyusutan dan Amortisasi		919.749.279	1.081.159.173
Beban Penyusutan Piutang tak tertagih		(109)	
JUMLAH BEBAN		5.301.566.238	5.510.295.144
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(5.300.566.238)	(5.510.295.144)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.3		
Surplus / Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		82.052.150	(120.001)
Surplus / Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Surplus / Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		(65.088.121)	(90.356.415)
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		16.964.029	(90.476.416)
POS LUAR BIASA	D.4	0	0
SURPLUS (DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA		0	0
SURPLUS (DEFISIT) - LO		(5.283.602.209)	(5.600.771.560)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**KANTOR LOKA RISET PERIKANAN TUNA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022***(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	E.1	22.615.448.897	23.785.412.125
SURPLUS (DEFISIT) - LO	E.2	(5.283.602.209)	(5.600.771.560)
KOREKSI YANG MENAMBAH / MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI / KESALAHAN MENDASAR	E.3	492.232.450	0
Penyesuaian Nilai Aset		0	0
Koreksi Nilai Persediaan		0	0
Koreksi Atas Reklasifikasi		0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap		0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		492.232.450	0
Koreksi Lain-Lain		0	0
JUMLAH		17.824.079.138	18.184.640.565
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	4.643.404.060	4.430.808.332
KENAIKAN / PENURUNAN EKUITAS	E.5	(147.965.699)	(1.169.963.228)
EKUITAS AKHIR	E.6	22.467.482.198	22.605.448.897

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Satuan Kerja Loka Riset Perikanan Tuna

*Dasar
Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Loka Riset Perikanan Tuna (LRPT) yang sebelumnya bernama Stasiun Monitoring Perikanan Tuna (SMPT) Benoa awalnya merupakan sebuah proyek kerjasama dimana inisiasi pertama pada tahun 1992 bekerjasama dengan Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) Australia yang dilatarbelakangi oleh meningkatnya tekanan aktivitas perikanan terhadap fishing ground tuna sirip biru selatan. Kerjasama berlanjut pada tahun 2002 dengan Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) dan Overseas Fishery Cooperation Foundation (OFCF) Jepang yang bertujuan untuk mencatat dan memonitoring tuna yang didaratkan di Benoa sebagai salah satu tempat pendaratan utama selain Cilacap dan Muara Baru. Pada perkembangannya komoditas yang dicatat juga mencakup tuna-like species seperti marlin (billfish) dan hasil tangkap sampingan (by-catch).

Pada tahun 2005 trial observer program dilaksanakan atas kerjasama Australian Centre for Agricultural Research (ACIAR) dan CSIRO dan berakhir tahun 2009. Pada tahun 2009 SMPT Benoa berdiri yang terintegrasi dengan Pusat Penelitian Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumberdaya Ikan (P4KSI) dan tahun 2010 di bawah tanggung jawab Balai Penelitian Perikanan Laut (BPPL). kemudian pada tahun 2011 berdiri sendiri menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) mandiri di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Balitbang KP) sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.27/MEN/2010. Pada tanggal 8 Maret 2011. operasional perkantoran LPPT secara resmi dibuka oleh Kepala Balitbang KP. Pada tahun 2017. terdapat perubahan nomenklatur Loka Penelitian Perikanan Tuna (LPPT) menjadi Loka Riset Perikanan Tuna (LRPT) hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 16/Permen-KP/2017 tentang organisasi dan tata kerja LRPT tanggal 27 Mei 2017.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Perikanan Tuna. merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang riset sumber daya perikanan tuna dan

sejenisnya (tuna like species). yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan yang menangani riset kelautan dan perikanan serta pengembangan sumberdaya manusia kelautan dan perikanan. Loka Riset Perikanan Tuna mempunyai tugas melaksanakan kegiatan riset sumber Daya perikanan tuna dan sejenisnya (tuna like species) di wilayah Republik Indonesia di perairan Samudera Hindia.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud. Loka Riset Perikanan Tuna menyelenggarakan fungsi :

- penyusunan rencana program dan anggaran. pemantauan. evaluasi.dan laporan;
- pelaksanaan kegiatan riset sumberdaya perikanan tuna dan sejenisnya (tuna like species) di wilayah Republik Indonesia di perairan Samudera Hindia yang meliputi aspek biologi. lingkungan. dinamika populasi dan eksploitasi;
- pelayanan teknis. jasa. informasi. komunikasi.dan kerjasama riset;
- pengelolaan prasarana dan sarana riset; dan
- pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut. Loka Riset Perikanan Tuna dipimpin oleh seorang Kepala. dengan struktur organisasi Loka Riset Perikanan Tuna terdiri dari:

- Urusan Umum : mempunyai tugas melakukan penyusunan. pemantauan. dan evaluasi rencana. program. dan anggaran. pelaporan. urusan keuangan. hubungan masyarakat. organisasi dan tata laksana. kepegawaian. persuratan. kearsipan. dokumentasi. rumah tangga. serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.
- Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Loka Riset Perikanan Tuna sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Loka Riset Perikanan Tuna. Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan masing-

masing fungsional sesuai dengan bidang tugas Loka Riset Perikanan Tuna.

Adapun struktur organisasi dan pejabat struktural yang duduk dalam organisasi Loka Riset Perikanan Tuna terlihat pada Bagan Struktur Organisasi Loka Riset Perikanan Tuna sebagai berikut:



Struktur Organisasi Loka Riset Perikanan Tuna

Visi dan Misi Loka Riset Perikanan Tuna:

Loka Riset Perikanan Tuna mempunyai visi “Menjadi Institusi Utama Penyedia Data dan Informasi Perikanan Tuna dan sejenisnya (*tuna like species*) di wilayah Negara Republik Indonesia di perairan Samudera Hindia”

Pada Tahun 2023. LRPT memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan 3 Sasaran Strategis dan 10 Indikator Kinerja Utama. Pengukuran capaian kinerja LRPT Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (*key performance indicator/KPI*) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan

pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balanced scorecard* dari Kementerian Kelautan Perikanan. yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>.

Sebagai langkah konkret untuk mewujudkan visi tersebut. telah ditetapkan misi Loka Riset Perikanan Tuna Benua yang dirumuskan sebagai berikut:

- Menyediakan data dan informasi terkini hasil penelitian perikanan tuna.
- Mengembangkan profesionalisme kelembagaan dan sumberdaya penelitian perikanan tuna

Keragaan SDM (Kekuatan SDM)

Pada Tahun 2023 Loka Riset Perikanan Tuna mempunyai total pegawai sebanyak 10 orang PNS dan 1 PPPK. Untuk mengoptimalkan kinerja Loka Riset Perikanan Tuna. dengan sumberdaya manusia yang terbatas. pelaksanaan tugas pegawai negeri sipil dibantu oleh 15 orang PPNP. sehingga total jumlah pegawai LRPT baik PNS maupun PPNP hingga saat ini menjadi 26 orang. Komposisi pegawai di Loka Riset Perikanan Tuna adalah sebagai berikut.

- Jumlah pegawai berdasarkan golongan
Komposisi jumlah PNS LRPT berdasarkan golongan/ruang per Tahun 2023 terdiri atas Golongan III sebanyak 8 orang dan Golongan II sebanyak 2 orang.
- Jumlah pegawai berdasarkan jenjang pendidikan
Jumlah PNS LRPT Tahun 2023 berdasarkan tingkat pendidikan terdiri dari jenjang S2 sebanyak 1 orang. S1 sebanyak 6 orang. D3 sebanyak 2 orang dan SLTA sebanyak 1 orang. PPNP jenjang pendidikan D3 sebanyak 1 orang
- Jumlah pegawai berdasarkan Jabatan Fungsional
Komposisi jumlah ASN LRPT Tahun 2023 berdasarkan jabatan fungsionalnya terdiri atas jabatan fungsional sebanyak 6 orang. fungsional umum/pelaksana sebanyak 3 orang dan struktural sebanyak 1 orang. PPPK jabatan pranata SDM Aparatur terampil sebanyak 1 orang.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Satuan Kerja Loka Riset Perikanan Tuna. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI disusun berdasarkan penginputan melalui aplikasi SAKTI beserta monitoringnya pada MONSAKTI. SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Basis Akuntansi

Satuan Kerja Loka Riset Perikanan Tuna menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Satuan Kerja Loka Riset Perikanan Tuna dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Satuan Kerja Loka Riset Perikanan Tuna. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Loka Riset Perikanan Tuna adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan- LRA

Pendapatan -LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan- LO

Pendapatan -LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi. yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto. yaitu dengan membukukan penerimaan bruto. dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran. pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar. Aset Tetap. Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir. apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas. diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman

Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan. Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA). Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset
Lainnya*

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar. aset tetap. dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud. tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan. aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan). dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas

Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi. Hak Paten Sederhana. Merk. Desain Industri. Rahasia Dagang. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran. Paten Biasa. Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan. Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II. Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan. Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga. Belanja yang Masih Harus Dibayar. Pendapatan Diterima di Muka. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang. dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu

lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kantor Loka Riset Perikanan Tuna terdapat sepuluh kali revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2023	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH DIREVISI
Pendapatan		
Pendapatan PNB	0	0
Jumlah Pendapatan	0	0
Belanja		
Belanja Pegawai	1.518.248.000	1.309.486.000
Belanja Barang	3.053.243.000	3.119.685.000
Belanja Modal	0	335.000.000
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Jumlah Belanja	4.571.491.000	4.764.171.000

Pada periode 31 Desember 2023 LRPT melaksanakan 6 (enam) kali revisi DIPA dan 4 (empat) kali revisi POK Satker. Revisi DIPA DIPA kewenangan KPA Revisi -1 terkait Belanja Penyesuaian Operasional Perkantoran (002); DIPA Revisi -2 terkait Perubahan Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA – Triwulan I; DIPA Revisi -3 terkait Perubahan Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA – Triwulan II; DIPA Revisi -4 terkait Perubahan Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA – Triwulan III; DIPA Revisi -5 terkait Perubahan Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA – Triwulan III dan pergeseran sisa belanja pegawai (001) ke Operasional Perkantoran (002); dan DIPA Revisi -6 terkait Perubahan Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA – Triwulan III dan buka blokir serta penambahan pagu belanja modal. Adapun revisi POK terdiri dari Revisi POK Operasional Perkantoran (002); Revisi POK Operasional Perkantoran (002) dan penyesuaian detail pada belanja 53 Belanja Modal ; Revisi POK memunculkan akun belanja Gaji pegawai PPPK pada Belanja Pegawai (001) dan Operasional Perkantoran (002) serta penyesuaian detail pada belanja 53 Belanja Modal ; dan Revisi POK Operasional Perkantoran (002) dan penyesuaian detail pada belanja 53 Belanja Modal. Daftar revisi anggaran tahun anggaran 2023 sebagai berikut :

Tabel . Revisi Dipa Petikan Satuan Kerja Loka Riset Perikanan Tuna
Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Tanggal DIPA	Total PAGU (Rp)	Total Blokir (Rp)	Kode Digital Stamp	Kategori Revisi
1	DIPA Petikan AWAL (403826)	30 November 2022	4.571.491.000	142.320.000	DS:5221-1918-9150-1820	-
2	DIPA Petikan REV-1 (403826)	09 Januari 2023	4.571.491.000	142.320.000	DS:5221-1918-9150-1820	-
3	DIPA Petikan REV-2 (403826)	10 Februari 2023	4.571.491.000	142.320.000	DS:5221-1918-9150-1820	-
4	DIPA Petikan REV-3 (403826)	05 April 2023	4.571.491.000	142.320.000	DS:5221-1918-9150-1820	-
5	DIPA Petikan REV-4 (403826)	14 Juli 2023	4.571.491.000	142.320.000	DS:5221-1918-9150-1820	-
6	POK SATKER-1	10 Agustus 2023	4.571.491.000	142.320.000	-	-
7	DIPA Petikan REV-5 (403826)	16 Oktober 2023	4.571.491.000	142.320.000	DS:4280-4818-3411-4908	-
8	DIPA Petikan REV-6 (403826)	30 Oktober 2023	4.764.171.000	-	DS:0762-7787-5232-5494	
9	POK SATKER-2	8 November 2023	4.764.171.000	-	DS:0762-7787-5232-5494	-
10	POK SATKER-3	30 November 2023	4.764.171.000		DS:0762-7787-5232-5494	
11	POK SATKER-4	6 Desember 2023	4.764.171.000	-	DS:0762-7787-5232-5494	

B.1 Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi
Pendapatan
Rp95.977.864

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp95.977.864. Pendapatan yang diperoleh bersumber dari pelepasan aset non lancar berupa hasil lelang alat dan mesin senilai Rp82.052.150. Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan berupa sewa ruang rapat senilai Rp1.000.000. Adapun penerimaan kembali belanja pegawai TAYL berupa pengembalian tunjangan kinerja pegawai (tunjangan kinerja bulan desember Rp21.885; tunjangan kinerja a.n Suciadi Catur N Rp2.027.750; dan tunjangan kinerja a.n Eka Karya Budi MS Rp2.160.000 melalui skema pemotongan SPM). Penerimaan kembali belanja barang TAYL berupa pengembalian honor pengelola keuangan senilai Rp666.000 dan pengembalian pemeliharaan gedung kantor masing masing senilai Rp951.079 dan Rp7.099.000.

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	30 Desember 2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Anggaran
Pendapatan Perpajakan	0	0	0
Pendapatan PNB	0	95.977.864	-
Pendapatan Hibah	0	0	0
Jumlah	0	95.977.864	-

Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023	TA 2022	% Naik (Turun)
Pendapatan Perpajakan	0	0	0
Pendapatan PNB	95.977.864	9.559.999	903,95
Pendapatan Hibah	0	0	0
Jumlah	95.977.864	9.559.999	903,95

B.2 Belanja Negara

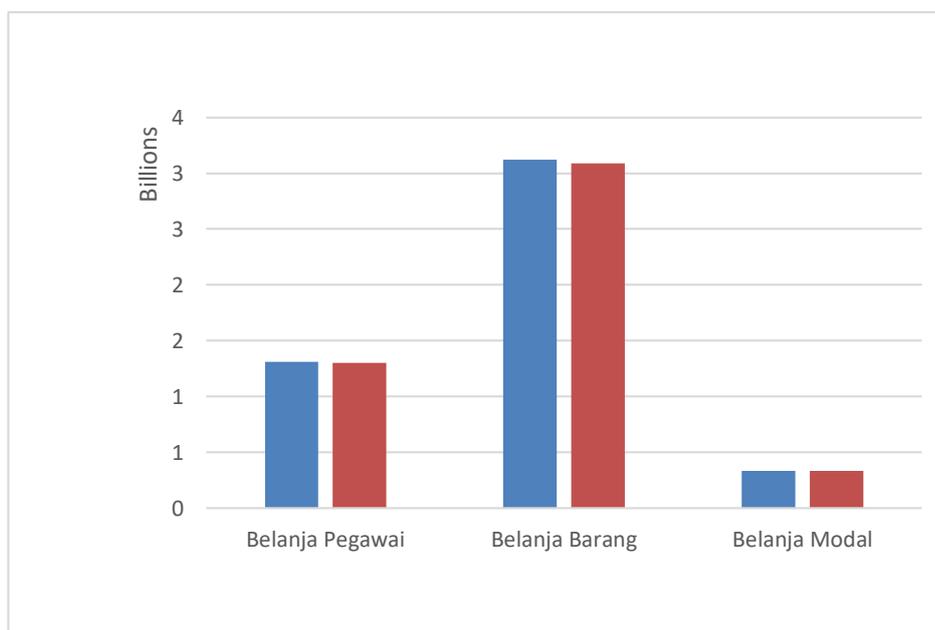
Realisasi
Belanja
Negara
Rp.4.722.206.
924

Realisasi Belanja instansi pada periode 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp4.722.206.924 atau 99 persen dari anggaran belanja sebesar Rp4.764.171.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja periode 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember 2023

Uraian	TA 2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Anggaran
Belanja Pegawai	1.309.486.000	1.301.604.492	99
Belanja Barang	3.119.685.000	3.086.337.432	99
Belanja Modal	335.000.000	334.265.000	99
Jumlah Belanja Negara	4.764.171.000	4.722.206.924	99

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Dibandingkan dengan periode 2022, Realisasi Belanja sampai dengan periode 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar 25,74 persen.

Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2023 dan 2021

Uraian	TA 2023	TA 2022	% Naik (Turun)
Belanja Pegawai	1.301.604.492	2.350.040.159	-44,61
Belanja Barang	3.086.337.432	2.090.328.172	47,65
Belanja Modal	334.265.000	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	4.722.206.924	4.440.368.331	6,35

B.3 Belanja Pegawai

Belanja
Pegawai
Rp1.301.604.
492

Realisasi Belanja Pegawai periode 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 1.301.604.492 dan Rp 2,350,040,159. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Belanja Pegawai 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023	TA 2022	% Naik (Turun)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	695.778.972	1.305.658.965	-46,71
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	8.309.304	0	
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	598.597.016	1.045.481.405	-42,74
Jumlah Belanja Kotor	1.302.685.292	2.351.140.370	-44,59
Pengembalian Belanja	1.080.800	1.100.211	-1,76
Jumlah Belanja	1.301.604.492	2.350.040.159	-44,61

Pengembalian belanja terdiri dari :

1. Pengembalian pembulatan gaji PNS senilai Rp 379;
2. Pengembalian Tunjangan Struktural PNS senilai Rp 1.080.000;
3. Pengembalian Tunjangan khusus/kegiatan senilai Rp 421;

B.4 Belanja Barang

Belanja
Barang
Rp3.086.337.
432

Realisasi Belanja Barang periode 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 3.086.337.432 dan Rp 2,108,648,000. Realisasi Belanja Barang periode 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 47,65 persen dari Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2022.

Perbandingan Belanja Barang 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023	TA 2022	% Naik (Turun)
Belanja Barang Operasional	1.147.346.582	1.206.268.662	-4,88
Belanja Barang Non Operasional	35.590.600	60.455.126	-41,13
Belanja Barang Persediaan	25.040.888	17.985.100	39,23
Belanja Jasa	397.334.342	258.742.821	53,56
Belanja Pemeliharaan	1.231.969.635	415.707.567	196,35
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	249.223.385	131.168.896	90,00
Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat / Pemda	-	-	
Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat / Pemda	-	-	
Jumlah Belanja Kotor	3.086.505.432	2.090.328.172	47,66
Pengembalian Belanja	168.000	0	
Jumlah Belanja	3.086.337.432	2.090.328.172	47,65

Rincian pengembalian belanja terdiri dari :

1. Pengembalian Belanja atas pembelian pakaian kerja pengemudi sejumlah 4 stel senilai Rp 168.000.-

Belanja Barang Operasional Penanganan Pandemi COVID-19

Satuan Kerja Loka Riset Perikanan Tuna mengalokasikan belanja barang untuk penanganan COVID-19 senilai Rp0 sudah terealisasi senilai Rp0 atau 0% dari anggaran yang tersedia sedangkan untuk belanja jasa penanganan COVID-19 dialokasikan senilai Rp 2.030.000 sudah terealisasi sebesar Rp 2.019.003 atau 0,54% dari alokasi anggaran.

Realisasi Belanja Barang Operasional Penanganan Pandemi Covid-19

Akun	Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19	0	0	0
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19	2.030.000	2.019.003	0,54
TOTAL		2.030.000	2.019.003	0,54

B.5 Belanja Modal

Belanja Modal
Rp334.265.00
0

Realisasi Belanja Modal periode 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 334.265.000 dan Rp0. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pada tahun anggaran 2023 Loka Riset Perikanan Tuna tidak mengalokasikan anggaran untuk belanja modal.

Perbandingan Belanja Modal 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023	TA 2022	% Naik (Turun)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	334.265.000	0	100
Jumlah Belanja Kotor	334.265.000	0	100
Pengembalian Belanja	0	0	-
Jumlah Belanja	334.265.000	0	100

Serapan belanja modal pada tahun 2023 berupa peralatan dan mesin sejumlah 334.265.000 dari total anggaran Rp 335.000.000 atau sebesar 99,78%.

Realisasi Belanja Modal

Akun	Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	334.265.000 0	334.265.000	99,78
TOTAL		334.265.000 0	334.265.000	99,78

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran 31 Desember 2023 dan 2022

KETERANGAN	TA 2023	TA 2022
Uang Tunai	-	-
Uang Di Rekening Bank (BNI)	-	-
JUMLAH	-	-

C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

*Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp0*

Nilai Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2023 dan 2022 dan masing-masing adalah senilai Rp0 dan Rp0.

C.3 Persediaan

*Persediaan
Rp25.082.953*

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp25.082.953 dan Rp190.525.664. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Adapun pada Satker Loka Riset Perikanan Tuna barang persediaan terbagi menjadi tiga kelompok bidang yaitu Barang Konsumsi dalam bentuk alat tulis, buku tulis, odner, map, staples, isi staples, tinta printer, mouse dan lainnya, sedangkan barang persediaan suku cadang dalam bentuk suku cadang alat laboratorium dan barang konsumsi bahan baku dalam bentuk bahan kimia cair dan padat . Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Per 31 Desember 2023 dan 2022

JENIS	TA 2023	TA 2022
Barang Konsumsi	25.082.953	28.452.914
Suku Cadang	0	45.860.415
Bahan Baku	0	116.212.335
JUMLAH	25.082.953	190.525.664

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

C.4 Tanah

Tanah
Rp13.175.070.000

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Satuan Kerja Loka Riset Perikanan Tuna per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp13.175.070.000 dan Rp13.175.070.000. Satuan Kerja Loka Riset Perikanan Tuna memiliki tanah yang terletak di Jalan Mertasari No. 140, Br. Suwung Kangin, Kel. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan – Bali sesuai dengan sertifikat hak pakai tanah nomor : 22.03.03.09.4.00063 seluas 1.900 m2 dan sertifikat hak pakai tanah nomor : 22.09.03.09.4.00064 seluas 149 m2. Adapun sampai dengan periode ini tidak terjadi transaksi mutasi tambah ataupun mutasi kurang. Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Saldo Tanah per 31 Desember 2023 dan 2022

31 Desember 2023	31 Desember 2022	KENAIKAN / (PENURUNAN)
Rp 13.175.070.000	Rp 13.175.070.000	-
Mutasi / perubahan tanah tsb adalah		-

Tidak terdapat perubahan nilai aset tanah pada Satuan Kerja Loka Riset Perikanan Tuna pada periode 31 Desember 2023.

C.5 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan
Mesin
Rp10.451.574.960

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp10.326.408.519 dan Rp10.321.550.291. Sampai dengan periode 31 Desember 2023 ini terjadi mutasi tambah pada kelompok peralatan mesin senilai Rp426.951.000 yang berasal dari transaksi transfer masuk aset dari Sekretariat berupa 1 unit kendaraan roda empat mobil Mitsubishi Pajero serta 3 unit peralatan mesin dari BBRBLPP Gondol senilai Rp 17.175.000, sedangkan untuk mutasi kurang berasal dari transaksi penghentian BMN dari penggunaan karena kondisi rusak berat senilai Rp422.092.722 berupa 1 unit mini bus, mesin bor, alat pengukur kedalaman, LCD proyektor, kursi besi/metal, AC split, teko listrik, gorden, facsimiles, alat lab umu, plankton net, UPS, long line receive, notebook, scanner dan external HD serta transaksi transfer keluar peralatan dan mesin sejumlah 27 unit ke Politeknik KP Jembrana senilai Rp226.273.559. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	10.321.550.291
Mutasi Tambah	
Pembelian	0
Reklas Masuk	0
Transfer Masuk	426.951.000
Mutasi Kurang	
Aset Tetap yg tdk digunakan	422.092.772
Saldo per 31 Desember 2023	10.451.574.960
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2023	(8.903.785.227)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	1.547.789.733

C.6 Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan
Rp9.803.394.601*

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp9.803.394.601 dan Rp9.205.549.601. Nilai tersebut merupakan nilai saldo awal ditambah dengan transaksi tambah berupa penambahan nilai gedung dan bangunan (kapitalisasi) berupa tambahan nilai gedung dari kegiatan pemeliharaan ruangan kepala kantor, laboratorium, dan ruang makan senilai Rp597.845.000. Adapun sampai dengan periode 31 Desember 2023 tidak terdapat mutasi kurang pada kelompok gedung dan bangunan. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	9.205.549.601
Mutasi Tambah	
Penambahan Nilai (kapitalisasi)	597.845.000
Mutasi Kurang	
Reklas Keluar	0
Saldo per 31 Desember 2023	9.803.394.601
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	(1.862.640.491)
Nilai Buku 31 Desember 2023	7.940.754.110

C.7 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

*Jalan, Jaringan
dan Irigasi
Rp264.996.920*

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tidak terdapat perubahan nilai aset tanah pada Satuan Kerja Loka Riset Perikanan Tuna pada periode 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp264.996.920 dan Rp264.996.920. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	264,996,920
Mutasi Tambah	-
Penambahan Jaringan Teknologi Informasi	-
Reklas Masuk	-
Mutasi Kurang	-
Reklas Keluar	-
Saldo per 31 Desember 2023	264.996.920
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	88.332.306
Nilai Buku per 31 Desember 2023	176.664.614

C.8 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
(Rp11.251.304.840)*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing (Rp11.251.304.840) dan (Rp10,439,293,466). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	13.175.070.000	0	13.175.070.000
2	Gedung dan Bangunan	9.803.394.601	1.960.687.586	7.940.754.110
3	Peralatan dan Mesin	10.451.574.960	9.197.868.333	1.547.789.733
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	264.996.920	92.748.921	176.664.614
	Akumulasi Penyusutan	33,695.036.481	11.251.304.840	22.840.278.457

C.9 Aset Lain-Lain

*Aset Lain-Lain
Rp8.064.876*

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah senilai Rp8.064.876 dan Rp0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	0
Mutasi Tambah	422.092.772
Penghentian Aset	422.092.772
Mutasi Kurang	-
Penghapusan BMN	0
Saldo per 31 Desember 2023	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	(414.027.896)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	8.064.876

*Utang Kepada Pihak Ketiga
Rp9.396.272*

C.10 Utang Kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2021 masing-masing sebesar Rp9.396.272 dan Rp8.715.174. Adapun rincian utang kepada pihak ketiga merupakan tagihan Listrik senilai Rp9.084.591, tagihan telepon senilai Rp.140.556, dan tagihan air senilai Rp 171.125. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

*Ekuitas
Rp 22.467.483.198*

C.11 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp22.467.483.198 dan Rp22.615.448.897. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

*Pendapatan PNBP
Rp1.000.000*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp1.000.000 dan Rp0. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	2023	2022	% Naik (Turun)
Pendapatan			
Pendapatan PNBP lainnya	1.000.000	0	100
Jumlah	1.000.000	0	100

Penerimaan berupa sewa ruang rapat (AC Kapasitas <50 orang) selama 2 hari senilai Rp. 1.000.000.

*Beban Pegawai
Rp1.303.654.127*

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai periode 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1,303,654,127 dan Rp2.343.395.374. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian Jenis Beban	2023	2022	% Naik (Turun)
Beban Gaji Pokok PNS	476.925.200	850.022.700	(43,89)
Beban Pembulatan Gaji PNS	7.229	12.716	(43,15)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	43.021.900	78.118.640	(44,92)
Beban Tunj. Anak PNS	12.411.054	23.793.940	(47,83)
Beban Tunj. Struktural PNS	6.480.000	14.760.000	(56,09)
Beban Tunj. Fungsional PNS	37.420.000	152.040.000	(75,38)
Beban Tunj. PPh PNS	276.150	3.149.018	(91,23)
Beban Tunj Beras PNS	32.082.060	61.339.740	(47,69)
Beban Uang Makan PNS	74.860.000	112.737.000	(33,59)
Beban Tunj. Umum PNS	11.215.000	8.585.000	(30,63)
Beban Gaji Pokok PPPK	5.294.400	0	-
Beban Pembulatan Gaji PPPK	56	0	-
Beban Tunj. Suami/Istri PPPK	529.440	0	-
Beban Tunj. Anak PPPK	105.888	0	-
Beban Tunj. Fungsional PPPK	720.000	0	-
Beban Tunj Beras PPPK	434.520	0	-
Beban Uang Makan PPPK	1.225.000	0	-
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus / Kegiatan)	593.644.386	1.038.836.620	(21,73)
Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	7.001.844	0	-
Jumlah Belanja	1.303.654.127	2.343.395.374	(44,36)
Kekurangan Gaji Pegawai TA yg Lalu			(0)
Jumlah Belanja Bersih	1.303.654.127	2.343.395.374	(44,36)

Beban Persediaan
Rp16.185.299

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada periode 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 16.185.299 dan Rp 15.160.969. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Terjadi peningkatan belanja barang persediaan jika dibandingkan dengan belanja barang persediaan pada periode 31 Desember 2022.

Uraian Jenis Beban	2023	2022	% Naik (Turun)
Beban Persediaan Konsumsi	16.185.299	15.160.969	6,75
Beban Persediaan Bahan Baku	-	-	-
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja	16.185.299	15.160.969	6,75

*Beban Barang dan
Jasa
Rp1.580.784.622*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa periode 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.580.760.622 dan Rp1.523.703.056. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian Jenis Beban	2023	2022	% Naik (Turun)
Beban Keperluan Perkantoran	1.015.338.489	1.060.615.258	-4,27
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	6.211.634	15.770.777	-60,61
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	873.708	394.620	121,40
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	78.036.000	85.168.000	-8,37
Beban barang operasional lainnya	46.718.751	1.287.000	3530,05
Beban Bahan	7.351.000	4.387.000	67,56
Beban Honor Output Kegiatan	8.160.000	8.160.000	0,00
Beban Barang Non Operasional Lainnya	20.079.600	47.908.126	-58,09
Beban Langganan Listrik	105.464.776	103.297.768	2,10
Beban Langganan Telepon	1.564.890	1.767.343	-12,02
Beban Langganan Air	1.888.500	1.731.000	8,23
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	270.000.000	113.245.812	138,42
Beban Sewa	5.994.000	6.590.000	-9,04
Beban Jasa Lainnya	11.084.271	12.489.500	-11,25
Beban Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19	2.019.003	17.857.845	-88,69
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	43.033.007	-100,00
Jumlah Belanja	1.580.784.622	1.523.703.056	3,74

D.5 Beban Pemeliharaan

*Beban Pemeliharaan
Rp1.231.969.635*

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing senilai Rp1.231.969.635 dan Rp415,707,567. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Terjadi peningkatan

beban pemeliharaan jika dibandingkan dengan beban pemeliharaan pada periode sebelumnya. Rincian beban pemeliharaan untuk periode 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian Jenis Beban	2023	2022	% Naik (Turun)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.034.841.000	210.409.945	391,82
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	183.787.181	189.255.272	-2,89
Beban Pemeliharaan lainnya	13.341.454	16.042.350	-16,84
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	-	-	
Beban Persediaan Suku Cadang			
Jumlah Belanja	1.231.969.635	415.707.567	196,35

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Rp249.223.385

Beban Perjalanan Dinas Pemeliharaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp249.223.385 dan Rp131.168.896. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk periode 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian Jenis Beban	2023	2022	% Naik (Turun)
Beban Perjalanan Biasa	242.603.385	125.878.896	92,73
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6.620.000	5.290.000	25,14
Jumlah Belanja	249.223.385	131.168.896	90,00

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp 919.749.279

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 919.749.279 dan Rp1,081,159,173. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Per 31 Desember 2023 dan 2022*

Uraian Jenis Beban	2023	2022	% Naik (Turun)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	714.342.730	879.023.653	-18,73
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	196.094.190	184.137.290	6,49
Beban Penyusutan Jaringan	8.833.230	8.833.230	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	479.129	9.165.000	-94,77
Jumlah Belanja	919.749.279	1.081.159.173	-14,93

D.8 Kegiatan Non Operasional

Defisit dari Kegiatan
Non Operasional
Rp16.964.029

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Defisit dari Kegiatan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	2023	2022	% Naik (Turun)
Pelepasan Aset Non Lancar	82.052.150	(120.001)	0
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	0	0	-100
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	0
Penyelesaian kewajiban jangka panjang	0	0	0
Kegiatan non operasional lainnya	(65.088.121)	(90.356.415)	100
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	16.964.029	(90.476.416)	4.170,1

Pos Luar Biasa Rp0

D.9 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Pos Luar Biasa untuk per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

*Ekuitas Awal
Rp22.615.448.897*

Nilai ekuitas pada periode 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp22.615.448.897 dan Rp23.785.412.125 .

E.2 Surplus (Defisit) LO

*Defisit LO
Rp(5.283.602.209)*

Jumlah Defisit LO untuk periode 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp(5.283.602.209) dan Rp(5,600,771,560). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

*Penyesuaian Nilai
Aset Rp0*

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

*Koreksi Nilai
Persediaan Rp0*

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan periode 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

*Selisih Revaluasi Aset
Tetap Rp0*

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap periode 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

E.3.4 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

*Koreksi Nilai Aset
Tetap Non Revaluasi
Rp492.232.450*

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode 31 Desember 2022 dan 2020 adalah sebesar Rp492.232.450 dan Rp(0).

*Transaksi Antar
Entitas
Rp4.643.404.060*

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp4.643.404.060 dan Rp4,430,808,332. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	4.722.206.924
Diterima dari Entitas Lain	(95.977.864)
Jumlah	4.643.404.060

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode 31 Desember 2023, DDEL sebesar Rp(95.977.864) sedangkan DKEL sebesar Rp4.722.206.924.

E.5 Ekuitas Akhir

*Ekuitas Akhir Rp
22,467,483,198*

Nilai Ekuitas pada periode 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 22,467,483,198 dan Rp 22,615,448,897.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Terdapat koreksi nilai pada Beban Langganan Listrik, Air, dan Telepon bulan desember. Sehingga nilai total beban langganan Listrik 2023 menjadi Rp. 105.464.776, total beban langganan air 2023 menjadi Rp. 1.888.500, dan total beban langganan telepon menjadi 1.564.890.

Beban Langganan Bulan Desember (Akrual)

Jenis Langganan	Unaudited	Audited	Selisih Pencatatan
Listrik	9.085.591	9.084.591	- 1.000
Telepon	130.556	140.556	10.000
Air	156.125	171.125	15.000

F.2 TEMUAN DAN TINDAK LANJUT

- Berdasarkan Surat Tugas Inspektorat Jenderal Nomor : B.80/ITJ.1/HP.550/IV/2023 tanggal 18 April 2023 tentang Pemantauan Keuangan, Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) dan Barang Milik Negara (BMN) Tahun anggaran 2022 dan 2023 pada Loka Riset Perikanan Tuna (LRPT) menghasilkan 4 Temuan dan 5 Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti secara tuntas pada tanggal 8 Mei 2023.

F.2.2 TINDAK LANJUT TEMUAN BPK

-

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032
ESELON I : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN 12
SATUAN KERJA : LOKA RISET PERIKANAN TUNA 403826

Tgl Data : 08/05/24 6:26 AM
 Tgl Cetak : 08/05/24 8:41 AM
 Halaman : 2
 lap_lra_face_satker_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
a. Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Transfer Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Dana Keistimewaan DIY	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	4,764,171,000	4,722,206,924	(41,964,076)	99	4,469,983,000	4,440,368,331	(29,614,669)	99
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL



NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN

WILAYAH/PROVINSI : (2200) BALI

SATUAN KERJA : (403826) LOKA RISET PERIKANAN TUNA

Tgl Data : 08/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 08/05/24 8:41 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_comparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Piutang Bukan Pajak	0	2,049,635	(2,049,635)	(100.00)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	0	(109)	109	(100.00)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	0	2,049,526	(2,049,526)	(100.00)
Persediaan	25,082,953	94,241,199	(69,158,246)	(73.38)
JUMLAH ASET LANCAR	25,082,953	96,290,725	(71,207,772)	(73.95)
ASET TETAP				
Tanah	13,175,070,000	13,175,070,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	10,451,574,960	10,321,550,291	130,024,669	1.26
Gedung dan Bangunan	9,803,394,601	9,205,549,601	597,845,000	6.49
Jalan, Irigasi dan Jaringan	264,996,920	264,996,920	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(11,251,304,840)	(10,439,293,466)	(812,011,374)	7.78
JUMLAH ASET TETAP	22,443,731,641	22,527,873,346	(84,141,705)	(0.37)
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	422,092,772	0	422,092,772	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(414,027,896)	0	(414,027,896)	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	8,064,876	0	8,064,876	
JUMLAH ASET	22,476,879,470	22,624,164,071	(147,284,601)	(0.65)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	9,396,272	8,715,174	681,098	7.82
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	9,396,272	8,715,174	681,098	7.82
JUMLAH KEWAJIBAN	9,396,272	8,715,174	681,098	7.82
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	22,467,483,198	22,615,448,897	(147,965,699)	(0.65)
JUMLAH EKUITAS	22,467,483,198	22,615,448,897	(147,965,699)	(0.65)
JUMLAH EKUITAS	22,467,483,198	22,615,448,897	(147,965,699)	(0.65)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	22,476,879,470	22,624,164,071	(147,284,601)	(0.65)

Keterangan :

FINAL



NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN

WILAYAH/PROVINSI : (2200) BALI

SATUAN KERJA : (403826) LOKA RISET PERIKANAN TUNA

Tgl Data : 08/05/24 6:26 AM

Tgl Cetak : 08/05/24 8:41 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	25,082,953	0
0.0	131111	Tanah	13,175,070,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	10,451,574,960	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	9,803,394,601	0
0.0	134113	Jaringan	264,996,920	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	9,197,868,333
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	1,960,687,586
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	92,748,921
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	422,092,772	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	414,027,896
0.0	212112	Beban barang yang masih harus dibayar	0	9,396,272
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	4,722,206,924
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	95,977,864	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	17,175,000
0.0	391111	Ekuitas	0	22,615,448,897
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	492,232,450
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	82,052,150
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	1,000,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	4,209,635
3.0	425912	Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	8,716,079
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	476,925,200	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	7,229	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	43,021,900	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	12,411,054	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	6,480,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	37,420,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	276,150	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	32,082,060	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	74,860,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	11,215,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	5,294,400	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	56	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	529,440	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	105,888	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	720,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	434,520	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	1,225,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN

WILAYAH/PROVINSI : (2200) BALI

SATUAN KERJA : (403826) LOKA RISET PERIKANAN TUNA

Tgl Data : 08/05/24 6:26 AM

Tgl Cetak : 08/05/24 8:41 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	593,644,386	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	7,001,844	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	1,015,338,489	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	6,211,634	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	873,708	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	78,036,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	46,718,751	0
3.0	521211	Beban Bahan	7,351,000	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	8,160,000	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	20,079,600	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	105,464,776	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	1,564,890	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	1,888,500	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	270,000,000	0
3.0	522141	Beban Sewa	5,994,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	11,084,271	0
3.0	522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	2,019,003	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,034,841,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	183,787,181	0
3.0	523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	13,341,454	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	242,603,385	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6,620,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	714,342,730	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	196,094,190	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	8,833,230	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	479,129	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	16,185,299	0
3.0	594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	109
3.0	596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	78,013,835	0
JUMLAH			39,617,770,252	39,617,770,252

Keterangan :
FINAL



NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN

WILAYAH/PROVINSI : (2200) BALI

SATUAN KERJA : (403826) LOKA RISET PERIKANAN TUNA

Tgl Data : 08/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 08/05/24 8:42 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	4,722,206,924
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	95,977,864	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	82,052,150
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	1,000,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	4,209,635
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	8,716,079
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	476,925,200	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	7,608	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	43,021,900	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	12,411,054	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	7,560,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	37,420,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	276,150	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	32,082,060	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	74,860,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	11,215,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	5,294,400	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	56	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	529,440	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	105,888	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	720,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	434,520	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	1,225,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	591,595,172	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	7,001,844	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,015,338,489	0
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	6,211,634	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	873,708	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	78,036,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	46,886,751	0
3.0	521211	Belanja Bahan	7,351,000	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	8,160,000	0
3.0	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	20,079,600	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	25,040,888	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	104,827,452	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	1,536,116	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	1,873,500	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	270,000,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN

WILAYAH/PROVINSI : (2200) BALI

SATUAN KERJA : (403826) LOKA RISET PERIKANAN TUNA

Tgl Data : 08/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 08/05/24 8:42 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522141	Belanja Sewa	5,994,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	11,084,271	0
3.0	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	2,019,003	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,034,841,000	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	183,787,181	0
3.0	523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	13,341,454	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	242,603,385	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6,620,000	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	334,265,000	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	379
3.1	511123	Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS	0	1,080,000
3.1	512411	Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	0	421
3.1	521119	Pengembalian Belanja Barang Operasional Lainnya	0	168,000
JUMLAH			4,819,433,588	4,819,433,588

Keterangan :

FINAL



Denpasar, 8 Mei 2024

Penanggung Jawab UAKPA

KPA Satuan Kerja

LOKA RISET
PERIKANAN TUNA

NI NYOMAN SITI MARDIANI SATRIA

198209032007012002

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN

WILAYAH/PROVINSI : (2200) BALI

SATUAN KERJA : (403826) LOKA RISET PERIKANAN TUNA

Tgl Data : 08/05/24 6:26 AM

Tgl Cetak : 08/05/24 8:40 AM

Halaman : 1

lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	1,000,000	0	1,000,000	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	1,000,000	0	1,000,000	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	1,000,000	0	1,000,000	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	1,303,654,127	2,343,395,374	(1,039,741,247)	(44.369)
Beban Persediaan	16,185,299	15,160,969	1,024,330	6.756
Beban Barang dan Jasa	1,580,784,622	1,523,703,056	57,081,566	3.746
Beban Pemeliharaan	1,231,969,635	415,707,567	816,262,068	196.355
Beban Perjalanan Dinas	249,223,385	131,168,896	118,054,489	90.002
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN

WILAYAH/PROVINSI : (2200) BALI

SATUAN KERJA : (403826) LOKA RISET PERIKANAN TUNA

Tgl Data : 08/05/24 6:26 AM

Tgl Cetak : 08/05/24 8:40 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	919,749,279	1,081,159,173	(161,409,894)	(14.929)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(109)	109	(218)	(200)
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	5,301,566,238	5,510,295,144	(208,728,906)	(3.788)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(5,300,566,238)	(5,510,295,144)	209,728,906	(3.806)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	82,052,150	(120,001)	82,172,151	(68,476.222)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	82,052,150	9,559,999	72,492,151	758.286
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	9,680,000	(9,680,000)	(100)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(65,088,121)	(90,356,415)	25,268,294	(27.965)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	12,925,714	0	12,925,714	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	78,013,835	90,356,415	(12,342,580)	(13.66)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	16,964,029	(90,476,416)	107,440,445	(118.75)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(5,283,602,209)	(5,600,771,560)	317,169,351	(5.663)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(5,283,602,209)	(5,600,771,560)	317,169,351	(5.663)

Keterangan :

FINAL

Denpasar, 8 Mei 2024

Penanggung Jawab UAKPA

KPA Satuan Kerja



NINNYOMAN SITI MARDIANI SATRIA

196209032007012002

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN

WILAYAH/PROVINSI : (2200) BALI

SATUAN KERJA : (403826) LOKA RISET PERIKANAN TUNA

Tgl Data : 08/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 08/05/24 8:41 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	22,615,448,897	23,785,412,125	(1,169,963,228)	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(5,283,602,209)	(5,600,771,560)	317,169,351	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	492,232,450	0	492,232,450	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	492,232,450	0	492,232,450	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	4,643,404,060	4,430,808,332	212,595,728	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(147,965,699)	(1,169,963,228)	1,021,997,529	-
EKUITAS AKHIR	22,467,483,198	22,615,448,897	(147,965,699)	-

Keterangan :

FINAL

